



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI NORHASANAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 84038

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	548.000.000
1. Tanah Seluas 600 m2 di BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/36 m2 di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/78 m2 di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
4. Tanah Seluas 400 m2 di KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	26.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	35.025.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	999.110
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	610.524.110
III. HUTANG	Rp.	376.398.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	234.125.910

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri



oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.